



PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

**KETUA
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA**



IRFANUDIN, S.H., M.H.

PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat karunia-Nya Laporan Kegiatan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada Tim Penyusun sehingga Laporan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kegiatan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2020 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun terakhir, yakni selama tahun 2020. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Prestasi yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA : "SIMPATIK", yakni: Sinergi Integritas Mandiri Profesional Akuntabel Transparan Inovatif dan Kompeten menuju Pengadilan Negeri Cibinong yang Terbaik.

Demikianlah Laporan Tahunan ini kami sajikan, untuk dapat memberikan gambaran umum dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kabupaten Bogor selama tahun 2020. Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang kami lakukan. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan demi terciptanya pelayanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Cibinong.

Kami berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Terima kasih.

Cibinong, Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



IRPANJUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19630808 199212 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN	1
B. VISI, MISI, KEBIJAKAN MUTU, BUDAYA KERJA dan MOTTO.....	4
C. WILAYAH YURIDIKSI.....	6
D. RENCANA STRATEGIS	7
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG	9
B. PENYELESAIAN PERKARA	10
1. Perkara Pidana	10
2. Perkara Perdata	14
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN	16
1. Posbakum.....	16
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	20
A. SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNIS YUDISIAL	20
B. SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG STRUKTURAL	20
C. KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL.....	22
D. KEBUTUHAN/USULAN PERMINTAAN SDM.....	22
E. PROMOSI DAN MUTASI DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG ..	23

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	39
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	39
B. ANGGARAN PAGU DAN REALISASI	42
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	45
1. Sarana dan Prasarana Gedung	45
2. Bidang Tata Persuratan dan Kearsipan	58
3. Bidang Perpustakaan.....	58
4. Bidang Barang Milik Negara (BMN).....	58
5. Bidang Keamanan	62
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	63
1. Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Cibinong	63
2. Implementasi Era Terang pada Pengadilan Negeri Cibinong	65
3. Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Cibinong	67
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	69
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	69
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	71
BAB VI PENGAWASAN INTERNAL DAN EVALUASI	74
A. PENGAWASAN INTERNAL	74
B. EVALUASI.....	78
BAB VII PENUTUP	80
A. KESIMPULAN	80
B. REKOMENDASI	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2020	10
Tabel 2	Jenis Putusan Perkara Pidana Anak (Anak sebagai Pelaku) Tahun 2020	11
Tabel 3	Data Upaya Hukum terhadap Putusan Perkara Pidana Tahun 2020	12
Tabel 4	Upaya Hukum terhadap Putusan Perkara Pidana Tahun 2020	13
Tabel 5	Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2020	14
Tabel 6	Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020	15
Tabel 7	Data Upaya Hukum terhadap Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020	16
Tabel 9	Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial	20
Tabel 10	Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong	21
Tabel 11	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Negeri Cibinong	22
Tabel 12	Usulan Aparatur Sipil Negara pada PN Cibinong	23
Tabel 13	Data Hakim yang Promosi dan Mutasi ke Pengadilan Lain selama Tahun 2020	23
Tabel 14	Data Pegawai yang Melaksanakan Tugas di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama Tahun 2020	24
Tabel 15	Data Pegawai yang Promosi dan Mutasi ke Pengadilan Lain selama Tahun 2020	25

Tabel 16	Data Pegawai yang Pensiun selama Tahun 2020	26
Tabel 17	Data Hakim dan Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	26
Tabel 18	Kebijakan Internal Tahun 2020	29
Tabel 19	Revisi DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2020	39
Tabel 21	Aset Tanah yang Dimiliki Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2020	59
Tabel 22	Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2020	60
Tabel 23	Data Kendaraan Roda 4 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020	61
Tabel 24	Data Kendaraan Roda 2 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020	61
Tabel 25	Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Cibinong	70

DAFTAR GAMBAR / GRAFIK

Gambar 1	Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	7
Grafik 1	Persentase Perkara Pidana Tahun 2020 – 2024	11
Gambar 2	Foto Gedung Pengadilan Negeri Cibinong	45
Gambar 3	Foto Gedung Pengadilan Negeri Cibinong	45
Gambar 4	Foto Gedung Pengadilan Negeri Cibinong	46
Gambar 5	Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong	46
Gambar 6	Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong	47
Gambar 7	Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong	47
Gambar 8	Area Merokok Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	48
Gambar 9	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	50
Gambar 10	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	50
Gambar 11	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	51
Gambar 12	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	51
Gambar 13	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	53
Gambar 14	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	53
Gambar 15	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	54
Gambar 16	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	54
Gambar 17	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	55
Gambar 18	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	55
Gambar 19	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	56
Gambar 20	Ruang Kerja Ketua	56
Gambar 21	Ruang Kerja Wakil Ketua	57
Gambar 22	Ruang Kerja Wakil Ketua	57
Gambar 23	Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Cibinong Kelas IA	63
Gambar 24	Monitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara	64
Gambar 25	Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Cibinong pada Mahkamah Agung RI	65
Gambar 26	Proses sinkronisasi SIPP	65
Gambar 27	Tangkap layar Jumlah Surat Keterangan	66
Gambar 28	Tangkap layar Peta Aplikasi e-Court	68

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diterimanya. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Pengadilan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif. Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu:

- 1) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.
- 2) Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

- 3) Dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang undang.
- 4) Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- 5) Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :
 - Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas Keadilan.
 - Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
 - Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
 - Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
 - Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
 - Putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya khususnya Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sejak dicanangkannya pelaksanaan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu bagi setiap lingkungan peradilan yaitu setiap pengadilan dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam bidang pelayanan publik secara terukur dan transparan maka Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah berenah diri untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya .

Berbagai Kegiatan dan program pembaharuan telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cibinong, tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, Jumlah Hakim dan pegawai yang sesuai dengan Kompetensinya, Sumber Daya Manusia aparat Pengadilan baik kualitas maupun kuantitas, serta hal hal lain yang mendukung kegiatan dan program yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang tersebut diatas.

Selain hal tersebut diatas sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA program prioritas yaitu :

1. Program Keterbukaan Sistem Informasi dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah disediakan sarana :
 - a. Website dengan alamat www.pn-cibinong.go.id;

- b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan alamat www.sipp.pn-cibinong.go.id
2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan Pada program ini Pengadilan Negeri Cibinong telah mempunyai Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Meja Pelayanan.

B. VISI, MISI, KEBIJAKAN MUTU, BUDAYA KERJA dan MOTTO

Visi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIBINONG YANG AGUNG”

1. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

2. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi

kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;
- Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

3. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Cibinong adalah berdasarkan **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN**, dimana segenap aparatur pengadilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. adil dan tidak diskriminatif;
2. cermat;
3. santun dan ramah;
4. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. profesional;
6. tidak mempersulit;
7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Cibinong;
9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. sesuai dengan kepantasan; dan
15. tidak menyimpang dari prosedur.

4. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah "SIMPATIK", Sinergi Integritas Mandiri Profesional Akuntabel Transparan Inovatif Kompeten.

C. WILAYAH YURIDIKSI

Pengadilan Negeri Cibinong merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas ± 298.838,31 Ha. Secara geografis terletak di antara 6°18'0" 6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45" 107°13'30" Bujur Timur, dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, dataran rendah sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15 100 meter di atas permukaan laut (dpl), merupakan kategori ekologi hilir.

Dataran bergelombang sekitar 43,62% berada pada ketinggian 100 – 500 meter dpl, merupakan kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53% daerah pegunungan berada pada ketinggian 500 - 1.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu. Daerah pegunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian 1.000 – 2.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000 2.500 meter dpl, merupakan kategori hulu. Batas batas wilayah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

yang tiap tahunnya dilakukan reuiu untuk perbaikan. Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya dengan baik. Sehingga Pengadilan Negeri Cibinong dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tersebut juga tidak terlepas dari Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung 2010-2035 dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, diharapkan agar antara Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program-program pembangunan di bidang hukum.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Nege ri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

BAB II

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

Selama tahun 2020, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah berhasil menyelesaikan 19.353 perkara pidana dari 19.494 perkara pidana (99,28%). Sedangkan untuk Perkara Perdata, telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.075 Perkara dari 1.415 perkara perdata (92,65%).

Sebagai Pengadilan Negeri Percontohan (*Pilot Project*) Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah berhasil melaksanakan pengadministrasian yang baik terhadap perkara pidana anak yang diterimanya. Dari 11 perkara anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikannya 11 perkara secara tepat waktu (100%).

Dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 219 perkara melalui mediasi, dengan hasil damai 12 perkara. Dengan demikian keberhasilan penyelesaian perkara melalui upaya mediasi mencapai 5,5%

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Perkara Pidana

Berikut adalah data perkara pidana selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA :

- a. Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2020 sebanyak 19.494 perkara, yang terdiri dari 165 perkara sisa tahun 2019 dan 19.329 perkara baru Tahun 2020.
- b. Dari 19.494 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 19.329 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2020 mencapai 99,28%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah berhasil menyelesaikan 114 Perkara dari 898 yang ditangani atau mencapai 44,71%. Terdapat 176 perkara yang belum dapat diputus dikarenakan sebagian besar dari perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember 2020.
- c. Untuk program tunggakan minutasi, dari 19.353 Perkara Pidana yang telah diputus, 19.239 perkara telah berhasil minutasi (99,77%).
- d. Sisa Perkara Pidana Tahun 2020 yang masih berjalan sampai akhir tahun 2020 sebanyak 176 Perkara.

Tabel 1. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019	Diterima 2020	Putus 2020	Minutasi 2020	Minutasi		Sisa 2020
					< 14 hr	> 14 hr	
Perkara Pidana							
- Biasa/Khusus (diluar perkara anak)	128	28	47	636	636	-	174
Perkara Anak Singkat	1	1	1	11	11	0	1
Lalulintas	35	31	66	18588	18588	0	0
- Tindak Pidana Ringan Pra Peradilan	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	4	4	-	1
Total	165	90	114	19239	19239	0	176

keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam 5 tahun terakhir yang disajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

Grafik 1. Persentase Perkara Pidana Tahun 2020-2024



Tabel 2. Jenis Putusan Perkara Pidana Anak (Anak sebagai Pelaku) Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Pelaku
1.	Pidana Penjara	15	16
2.	Pelatihan Kerja di Panti Rehabilitasi	-	-
3.	Dikembalikan kepada Orang Tua		
	Jumlah	15	16

**Tabel 3. Data Upaya Hukum
Terhadap Putusan Perkara Pidana Tahun 2020**

No	Nomor Dan Tanggal Surat	Nama Anak	Pasal	Tanggal Kesepakatan	Tanggal, No Penetapan	Tanggal, Pelaksanaan Isi Diversi
1	1/Pen.Div/2020/ PN Cbi jo 1/Pid. Sus-Anak/2020/ PN Cbi DAN 20 FEBRUARI 2020	MUHAMAD AJI BIN H. EUMAD	PASAL 363 AYAT (1) KE-4 KUHP	24 FEBRUARI 2020	20 FEBRUARI 2020 DAN 1/PEN-DIV/ 2020/PN CBI	27 FEBRUARI 2020 DIVERSI BERHASIL
2	2/Pen. Div/2020/ PN Cbi jo 1/Pid. Sus-Anak/2020/ PN Cbi DAN 26 Februari 2020	ILHAM ZIKRIL MAULANA BI WAHYUDI	NARKOTIKA	27 FEBRUARI 2020	26 FEBRUARI 2020 2/Pen.Div/2020 /PN Cbi	27 FEBRUARI 2020 DIVERSI TIDAK BERHASIL
3	3/Pen.Div/2020/ PN Cbi DAN 27 April 2020	AZHARI ALS ANG BIN M. SALEH (ALM)	KESEHATAN	22 APRIL 2020	27 APRIL 2020 3/Pen.Div/2019 /PN Cbi	27 FEBRUARI 2020 DIVERSI TIDAK BERHASIL
4	4/Pen.Div/2020/ PN Cbi DAN 05 Agustus 2020	TRIO NAUFAL SHIDDIE BIN SAPIN	Perlindungan Anak	24 JULI 2020	05 AGUSTUS 2020 4/Pen.Div/2019 /PN Cbi	05 AGUSTUS 2020 DAN DIVERSI TIDAK BERHASIL
5	5/Pen.Div/2020/ PN Cbi DAN 05 Agustus 2020	ALI IRAWAN BIN WAWAN GUNAWAN	PENCURIAN	29 JULI 2020	05 AGUSTUS 2020 5/Pen.Div/2020 /PN Cbi	05 AGUSTUS 2020 DIVERSI TIDAK BERHASIL
6	6/Pen.Div/2020/ PN Cbi DAN 04 DESEMBER 2020	ADITYA SAPUTRA ALS ADIT BIN R. SALEH	Perlindungan Anak	27 NOVEMBER 2020	04 DESEMBER 2020 6/Pen.Div/2020 /PN Cbi	04 DESEMBER 2020 DIVERSI TIDAK BERHASIL
7	7/Pen.Div/2020/ PN Cbi DAN 10 DESEMBER 2020	1. DANI HERMAWAN BIN WAWAN HERMAWAN 2. RAFLI DESKI BIN FERNANDA	Perlindungan Anak	30 NOVEMBER 2020	10 DESEMBER 2020 7/Pen.Div/2020 /PN Cbi	10 DESEMBER 2020 DIVERSI TIDAK BERHASIL

Tabel 4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Masuk	Dikirim Ke PT/MA RI	Dicabut/ Guqur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA RI
1	Perkara Pidana Banding	5	20	22	3	-
2	Perkara Pidana Kasasi	1	23	22	2	-
3	Perkara Pidana Peninjauan Kembali	-	2	1	1	-

Untuk Perkara Pidana Yang Mengajukan **Grasi** yang diterima kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut :

- Belum putus s/d Des 2019 : - perkara
- Masuk tahun 2020 : - perkara
- Dikirim ke MA tahun 2020 : - perkara
- Putus tahun 2020 : - perkara
- Sisa tahun 2020 : - perkara

2. Perkara Perdata

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- a. Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2020 sebanyak 1.415 perkara, dan perkara yang diputus adalah sebanyak 1.169 perkara, dan 246 sisa perkara yang masih berjalan di akhir tahun 2020
- b. Dari 1.415 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.169 Perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara perdata Tahun 2020 mencapai 82,61%.
- c. Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 1.169 Perkara Perdata yang telah diputus, 1.157 diantaranya telah berhasil minutasikan. Terdapat 199 perkara yang sudah putus pada akhir tahun 2019 dan diminutasi pada tahun 2020 sehingga jumlah perkara yang berhasil diminutasi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara yang telah putus.

Tabel 5. Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Diterima 2020	Dicabut 2020	Putus 2020	Minutasi 2020	Belum Minutasi		Sisa 2020 (masih berjalan)
							<14 hr	>14 hr	
1.	Perkara Perdata Gugatan	171	417	63	379	372	-	14	209
2.	Perkara Perdata Permohonan	41	786	79	790	795	3	2	37
	Total	212	1203	142	1169	1157	3	16	246

Keberhasilan Mediasi memang dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang penting juga. Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi masih terus harus dilakukan.

Ditahun 2020, dari 219 Perkara yang dilakukan Mediasi, yang berhasil damai baik dengan akta perdamaian sebanyak 12 perkara, tidak berhasil 200 perkara dan sampai 31 Desember 2020 masih ada 14 perkara yang masih dalam proses mediasi. Dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA ditahun 2020 realisasinya sebesar 5,5%.

**Tabel 6. Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020**

Tidak dapat dilaksanakan	Mediasi Berhasil	Tidak Berhasil	Belum ada Mediasi	Masih Berjalan
7	12	200	146	14

Adapun jenis jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama tahun 2020 dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Perkara Perdata Gugatan sebanyak 417 perkara yang terdiri dari:

- Tanah : 53 perkara
- Barang bukan tanah / perumahan : 42 perkara
- Perceraian : 124 perkara
- Harta perkawinan : 3 perkara
- Asuransi : - perkara
- Penyalahgunaan hak : - perkara
- Wanprestasi : 50 perkara
- Perbuatan melawan hukum : 138 perkara
- Ganti rugi : 2 perkara
- Pengangkata anak : - perkara
- Lain lain : 5 perkara

b. Perkara Perdata Permohonan sebanyak perkara yang terdiri dari:

- Ganti nama : 113 perkara
- Pengangkatan anak : 3 perkara
- Wali pengampu : 2 perkara
- Perbaikan akta kelahiran : 472 perkara
- Akte kematian : 32 perkara
- Akte perkawinan : 13 perkara

- Perwalian dan ijin jual : 35 perkara
- Perwalian : 23 perkara
- Lain lain : 93 perkara

Untuk Perkara Perdata Yang Mengajukan Upaya Banding yang diterima kepanitera Perdata Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut :

Tabel 7. Data Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Masuk Tahun 2020	Dikirim Ke PT/MA-RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI
1	Perkara Perdata Banding	32	65	15	1	3
2	Perkara Perdata Kasasi	6	47	48	3	3
3	Perkara Perdata Peninjauan Kembali	3	18	19	3	2

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

1. POSBAKUM

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut. Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini kemudian direspon oleh Mahkamah Agung RI dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke

pengadilan. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum prosedural, baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Posbakum merupakan usaha Mahkamah Agung RI untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat awam hukum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetap dapat beracara di Pengadilan. Dalam pos bantuan hukum ini akan disediakan Pengacara piket yang bertugas untuk memberikan layanan hukum berupa Konsultasi/Advis hukum kepada Masyarakat yang membutuhkan tanpa biaya (gratis).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No 1 Tahun 2014 bahwa pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang melayani pemberian informasi, konsultasi dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di pengadilan juga dapat memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, Konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Pemberi Layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bakum yang Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Cibinong dan bertugas sesuai dengan kesepakatan Jam Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong yang dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama.

Sebagai pelaksanaan/implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA menjalin kerjasama dengan dengan Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Cibinong dalam memberikan pelayanan Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu. Dengan diketuai oleh SARIPIN, S.H. berkedudukan di Kmp. Tanah Baru No.4 Desa Waringin jaya, Kecamatan Bojong Gede Jawa Barat

Sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 setiap pada awal tahun anggaran Pengadilan Negeri Cibinong melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum. Berikut adalah tahapan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA terhadap kinerja Petugas Pemberi Layanan Hukum:

1. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong menunjuk Tim Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum dan menuangkannya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
2. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mengumumkan kepada publik tentang pelaksanaan Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum;
3. Melakukan seleksi dan penilaian terhadap kelengkapan dokumen Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang masuk;

4. Mengumumkan Hasil Seleksi Dokumen Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum;
5. Memanggil dan melakukan wawancara terhadap Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang lulus seleksi dokumen;
6. Mengumumkan hasil dari Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA kepada Publik;
7. Melakukan penandatanganan kerjasama pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

BAB III

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

A. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Tahun

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Hakim	19 Orang	Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	4 Orang	
3.	Panitera Pengganti	23 Orang	
4.	Jurusita	3 Orang	
5.	Jurusita Pengganti	7 Orang	
	Total	56 Orang	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan:

1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 58 (lima puluh delapan) Orang, yang terdiri dari 19 orang Hakim, 4 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 23 Panitera pengganti, 3 Orang Jurusita dan 7 Orang Jurusita Pengganti
2. Jumlah Panitera Pengganti dan Jurusita tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Cibinong.

B. Sumber Daya Manusia Bidang Struktural Tahun

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini :

**Tabel 10. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial
Pengadilan Negeri Cibinong**

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	4 Orang	
2.	Staf Administrasi	9 Orang	Termasuk Staf yang ada di Kepaniteraan
	Total	13 Orang	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berjumlah 13 (tiga belas) Orang, yang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural bidang kesekretariatan dan 9 Orang Staff.
2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, Budi Wantoro, S.H., M.H. sebagai Sekretaris, Linda Cahyati, .SH. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Enny Hudikari, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Riyanto, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.
3. Staff Administrasi berjumlah 9 (duabelas) orang sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada Sekretariat Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yaitu sebagai unit pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4. Pada Kepaniteraan Hukum tidak ada staf, hanya 1 (satu) orang Jurusita Pengganti yang membantu pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum. Sementara pada Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 3 (tiga) orang staf, yaitu Kasir dan 2 (dua) orang staf administrasi Perkara Perdata sekaligus petugas PTSP. Pada

bagian kepaniteraan Pidana terdapat 3 (tiga) orang Staf yang juga merupakan petugas PTSP.

5. Hal inilah yang menyebabkan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta pekerjaan administrasi yang diberikan kepada honorer dengan pengawasan langsung dari para Kepala Sub maupun Panitera Muda.

C. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun

Tabel 11. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Negeri Cibinong

JABATAN/ POSISI	JENIS KELAMIN		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SMA	D3	S1	S2	S3
Hakim	12	7		2	17				5	14	
Pejabat Struktural	2	2		2	2				2	2	
Pejabat Fungsional		4			4					3	1
Panitera Pengganti	9	14		16	7		3	1	10	9	
Jurusita	2	1		3					2		
Jurusita Pengganti	6	1	1	6			4		3		
Staf Administrasi	5	4	2	7			3	2	3	1	
Total	36	33	3	36	30		10	3	25	29	1

D. Kebutuhan/Usulan Permintaan SDM Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan sumber daya manusianya, harus mengajukannya ke Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Laporan Penetapan Hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan Perhitungan Analisis Beban Kerja beserta Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tanggal 11 Oktober 2020.

Tabel 12. Usulan Aparatur Sipil Negara pada PN Cibinong

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH YANG DIMINTA	KETERANGAN
1.	Staf Kepaniteraan Perdata	5 Orang	
2.	Staf Kepaniteraan Pidana	2 Orang	
3.	Staf Kepaniteraan Hukum	2 Orang	
4.	Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	2 Orang	
5.	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	4 Orang	
6.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	5 Orang	
	Total	20 Orang	

E. Promosi dan Mutasi Yang Terjadi Di Pengadilan Negeri Cibinong Selama Tahun

Promosi dan Mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Data Hakim yang promosi dan mutasi ke Pengadilan lain selama Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN LAMA DI PN CIBINONG	JABATAN BARU
1.	Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
2.	Tira Tirtona, S.H., M.Hum.	Hakim	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung
3.	Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Tabel 14. Data Pegawai yang melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Selama Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN DI PN Cbi	TMT JABATAN	MUTASI DARI	JABATAN SEBELUMNYA
1	Budi Wantoro, S.H., M.H.	Sekretaris	7-1-2020	Mahkamah Agung RI	Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring pada Biro Perlengkapan BUA MARI
2	Enny Hudikari, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian PTIP	6-2-2020	PN Depok	Kepala Sub Bagian PTIP
3	Budi Rahayu Purnomo, S.H.	Hakim	27-2-2020	PN Tahuna	Wakil Ketua
4	Eduward, S.H., M.H.	Hakim	23-3-2020	PN Dobo	Wakil Ketua
5	Ika Dhianawati, S.H., M.H.	Hakim	12-3-2020	PN Madiun	Hakim
6	Rina Zain, S.H.	Hakim	16-3-2020	PN Yogyakarta	Hakim
7	Yunita Sofriani, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	27-3-2020	PN Serang	Panitera Muda Pidana
8	Endang Purwaningsih, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	27-3-2020	PN Bekasi	Panitera Pengganti
9	Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1-4-2020	PN Serang	Panitera Pengganti
10	Dwi Rahayu, S.H.	Panitera Pengganti	1-4-2020	PN Depok	Panitera Pengganti
11	Satriani Yulianti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1-4-2020	PN Depok	Panitera Pengganti
12	Elaeli, S.H.	Panitera Pengganti	9-3-2020	PN Bogor	Panitera Pengganti

13	Ida Lestari, S.H.	Panitera Pengganti	9-3-2020	PN Bogor	Panitera Pengganti
14	Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	9-3-2020	PN Bogor	Panitera Pengganti
15	Nizar, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1-4-2020	PN Jakarta Timur	Panitera Pengganti
16	Putu Mahendra, S.H., M.H.	Hakim	22-6-2020	PN Gresik	Hakim
17	Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.	Hakim	2-6-2020	PN Jember	Hakim
18	Christina Simanullang, S.H., M.H.	Hakim	1-7-2020	PN Blitar	Hakim
19	Erlinawati, S.H.	Hakim	30-6-2020	PN Cianjur	Hakim
20	Zulkarnaen, S.H.	Hakim	21-7-2020	PN Manna	Wakil Ketua

Tabel 15.

**Data Pegawai yang promosi dan mutasi ke Pengadilan lain
Selama Tahun 2020**

NO	NAMA	JABATAN DI PN Cbi	TGL KELUAR	JABATAN BARU
1	Rio Grace Elisabeth Sitompul, S.Kom., M.Si., M.Kom.	Kepala Sub Bagian PTIP	5-2-2020	Kepala Sub Bagian PTIP PN Depok
2	Noverini, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	24-03-2020	Panitera Pengganti PT Bandung
3	Tasdik, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	23-3-2020	Panitera Muda Hukum PN Bekasi
4	Achmad Nurjaman, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	20-3-2020	Panitera Muda Hukum PN Sukabumi
5	Min Setiadhi, S.H.	Panitera Pengganti	1-4-2020	Panitera Pengganti PN Jakarta Timur
6	Puji Asih, S.H., M.H.	Panitera	11-3-2020	Panitera

		Pengganti		Pengganti PN Jakarta Selatan
7	Sri Gusliawatni, S.H.	Panitera Pengganti	11-3-2020	Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan
8	Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.	Panitera Pengganti	16-3-2020	Panitera Pengganti PN Jakarta Timur
9	Minati Indriani, S.H.	Panitera Pengganti	9-3-2020	Panitera Pengganti PN Tangerang
10	Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan	18-12-2020	Panitera Pengganti PN Bogor

Tabel 16.

Data Pegawai yang Pensiun Selama Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN	PENSIUN
1.	Nusi, S.H., M.H.	Hakim	24-12-2020	Pensiun Karena Meninggal Dunia
2.				
3.				

Tabel 17.

**Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti oleh Hakim dan
Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong Selama Tahun 2020**

NO	NAMA	DIKLAT	TEMPAT
1.	Irfanudin, S.H., M.H.	Pelatihan/Workshop Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), 28-30 Januari 2020	Sentul, Bogor
2.	Darius Naftali, S.H., M.H.	Pelatihan Teknis Fungsional Perkara Terorisme bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, 16 Oktober s.d. 12 November 2020	Online
3.	Rina Zain, S.H.	Pelatihan <i>Online General English</i> , 19-23 Oktober 2020	Online
4.	Indra Meinantha Vidi, S.H.	Pelatihan <i>Online</i> Kepemimpinan Lini Pertama Mahkamah Agung RI, 5-7 Agustus 2020	Online
5.	Indra Meinantha Vidi, S.H.	Pelatihan <i>Online</i> Inovasi Pengadilan Dalam Tatanan New Normal Baru – Pendekatan Desain Berpikir, 11-13 Agustus 2020	Online

6.	Indra Meinantha Vidi, S.H.	Pelatihan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Lingkungan Peradilan Umum, 16-26 Oktober 2020	Online
7.	Christina Simanullang, S.H., M.H.	<i>Short Course</i> Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Peradilan Umum T.A. 2020, 30 September-2 Oktober 2020	Bekasi
8.	Christina Simanullang, S.H., M.H.	Pelatihan Teknis Fungsional Gugatan Sederhana bagi Hakim, 16 Oktober-5 November 2020	Online
9.	Eduward, S.H., M.H.	English Effective Presentation, 3-11 Agustus 2020	Online
10.	Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.	Pelatihan <i>Online</i> Kebahagiaan Kerja di Pengadilan <i>Happines at Work</i> , 29 September-1 Oktober 2020	Online
11.	Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.	Pelatihan <i>Online Preparation For The TOEFL</i> , 5-13 Oktober 2020	Online
12.	Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.	Pelatihan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Lingkungan Peradilan Umum, 16-26 Oktober 2020	Online
13.	Ika Dhianawati, S.H., M.H.	Pelatihan <i>Online Preparation For The TOEFL</i> , 5-13 Oktober 2020	Online
14.	Erlinawati, S.H.	<i>Short Course</i> Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Peradilan Umum T.A. 2020, 30 September-2 Oktober 2020	Bekasi
15.	Putu Mahendra, S.H., M.H.	Pelatihan <i>Online</i> Teknis Fungsional Niaga HKI bagi Hakim Peradilan Umum, 18 September-9 Oktober 2020	Online
16.	Amran S. Herman, S.H., M.H.	Pelatihan <i>Online</i> Fotografi Konten Media Sosial secara <i>Online</i> , 28 September-2 Oktober 2020	Online
17.	Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.	Pelatihan <i>Online Basic Video Production Kelas 01</i> , 31 Agustus-4 September 2020	Online
18.	Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.	Pelatihan <i>Online Preparation For The Toefl</i> , 26 Agustus-3 September 2020	Online
19.	Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.	<i>Short Course</i> Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Peradilan Umum T.A. 2020, 30 September-2 Oktober 2020	Bekasi

20.	Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.	Sosialisasi Legalitas Tanda Tangan Elektronik dan Bimbingan Teknis Tata Cara Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi eCourt TA. 2020, 18-19 Februari 2020	Jakarta
21.	Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Implementasi E- Litigasi dan Kebijakan Kemudahan Berusaha Tahun Anggaran 2020, 25-27 November 2020	Jakarta
22.	Budi Wantoro, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Rencana Program dan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, 18-20 November 2020	Bandung
23.	Linda Cahyati, S.H.	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2020	Bandung
24.	Riyanto, S.H.	Bimbingan Teknis Kepegawaian Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung, 4-6 November 2020	Bandung
25.	Yunita Ellyana, S.H.	Bimbingan Teknis Panitera Pengganti Wilayah PT Bandung, 26-28 Agustus 2020	Bandung
26.	Haris Kaimudin, A.Md., S.H.	Bimbingan Teknis Panitera Pengganti Wilayah PT Bandung, 26-28 Agustus 2020	Bandung
27.	Dimas Lingga Wicaksana, S.H.	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2020	Bandung
28.	Dimas Lingga Wicaksana, S.H.	Bimbingan Teknis Rencana Program dan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, 18-20 November 2020	Bandung
29.	Gabriela Yastika Putri, S.Psi.	Bimbingan Teknis Kepegawaian Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung, 4-6 November 2020	Bandung
30.	Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom.	Bimbingan Teknis Rencana Program dan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, 18-20	Bandung

		November 2020	
31.	Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom.	Pelatihan <i>Basic Motion Graphic with Adobe After Effect</i> , 21-25 September 2020	Online
32.	Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom.	Pelatihan Pranata Komputer & Pelatihan English Effective Presentation Tahun 2020, 16-27 Februari 2020	Bogor
33.	Irene Isabella Nainggolan, S.H.	Pelatihan <i>Online Risk Management for Public Sector</i> (Manajemen Resiko) <i>Batch 3C</i> , 6-10 Juli 2020	Online
34.	Agung Devyanto, A.Md.	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2020	Bandung

Tabel 18.

Kebijakan Internal Tahun 2020 (Surat Keputusan/Wakil Ketua/Panitera Pengadilan Negeri Cibinong)

NO	NOMOR SK	TANGGAL SK	PERIHAL
1	W11-U20/2/KPN.Cbi/KP.00.1/I/2020	07-01-2020	SK Tim Baperjakat PN Cibinong
2	W11-U20/3/KPN.Cbi/KP.00.3/I/2020	07-01-2020	SK Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja Hakim PN Cibinong 2020
3	W11-U20/4/KPN.Cbi/KP.00.3/ I/2020	07-01-2020	SK Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja ASN PN Cibinong 2020
4	W11-U20/6/KPN.Cbi/OT.01.2/ I/2020	08-01-2020	SK Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 PN Cibinong
5	W11-U20/7/KPN.Cbi/OT.01.2/ I/2020	08-01-2020	SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019 PN Cibinong
6	W11-U20/8/KPN.Cbi/OT.01.2/ I/2020	08-01-2020	SK Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2020-2024
7	W11-U20/9/KPN.Cbi/OT.01.2/ I/2020	08-01-2020	SK Tim Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 PN Cibinong

8	W11-U20/12/KPN.Cbi/ OT.01.2/ I/2020	31-01-2020	SK Penetapan IKU PN Cbi
9	W11-U20/14/KPN.Cbi/ OT.00/ II/2020	06-02-2020	SK Struktur Pelaksana PTSP PN Cibinong
10	W11-U20/16/KPN.Cbi/ HM.02.3/ II/2020	11-02-2020	SK Pembentukan Tim Persiapan Lomba Penilaian PTSP PN Cibinong
11	W11-U20/27/KPN.Cbi/ OT.01.3/ III/2020	6-3-2020	SK Tim Evaluasi Pelaksanaan SOP Kepaniteraan Peradilan Umum PN Cibinong
12	W11-U20/28/KPN.Cbi/ OT.01.3/ III/2020	6-3-2020	SK Penetapan Yel-Yel PN Cibinong
13	W11-U20/32/KPN.Cbi/ OT.01.3/ III/2020	18-3-2020	SK Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Pengadilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di PN Cibinong
14	W11-U20/33/KPN.Cbi/ KP.00.1/ III/2020	18-3-2020	SK Tim Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Di Bidang Perbendaharaan PN Cibinong Kelas I A
15	W11-U20/35/KPN.Cbi/ OT.01.3/ III/2020	18-3-2020	Instruksi Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim & Aparatur PN Cibinong selama masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
16	W11-U20/38/KPN.Cbi/ OT.01.3/ III/2020	23-3-2020	SK Pengaturan Sistem Kerja Bagi Hakim dan Aparatur, serta Pemberlakuan Pendaftaran Perkara Secara Online (Ecourt) Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di PN Cibinong Kelas I A
17	W11-U20/39/KPN.Cbi/ KP.04.5/ III/2020	23-3-2020	SK Peralihan Tugas Bagi pelaksana/Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A an Rangga Widayachman
18	W11-U20/40/KPN.Cbi/ KP.04.5/ III/2020	23-3-2020	SK Peralihan Tugas Bagi pelaksana/Pegawai Tidak Tetap (PTT) Non DIPA Di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A an Rizkia

			Novariantie
42	W11-U20/42/KPN.Cbi/ HM.02.3/ IV/2020	1-4-2020	SK Penunjukan Admin Level 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A an Jonathan Jahry Hasudungan
19	W11-U20/43/KPN.Cbi/ PS.01/ IV/2020	1-4-2020	SK Hakim Pengawas Bidang
20	W11-U20/44/KPN.Cbi/ HK.02/ IV/2020	1-4-2020	SK Penunjukan Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A an Muhamad Irfan Nurdin
21	W11-U20/45/KPN.Cbi/ HK.00/ IV/2020	6-4-2020	SK Susunan Majelis Hakim dan Penggunaan Ruang Sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
22	W11-U20/46/KPN.Cbi/ OT.01.3/ IV/2020	6-4-2020	SK Perubahan Atas Keputusan Ketua PN Cibinong Nomor W11-U20/38/KPN.Cbi/OT.01.3/III/2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Bagi Hakim dan Aparatur, serta Pemberlakuan Pendaftaran Perkara Secara Online (Ecourt) Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di PN Cibinong Kelas I A
23	W11-U20/47/KPN.Cbi/ OT.01.3/ IV/2020	21-4-2020	SK Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua PN Cibinong Kelas I A Nomor W11-U20/38/KPN.Cbi/OT.01.3/III/2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Bagi Hakim dan Aparatur, serta Pemberlakuan Pendaftaran Perkara Secara Online (Ecourt) Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di

			PN Cibinong Kelas I A
24	W11-U20/48/KPN.Cbi/ HK.02/ V/2020	4-5-2020	SK Pembentukan Tim Pengelola Biaya Proses pada PN Cibinong Kelas I A
25	W11-U20/49/KPN.Cbi/ OT.00/ V/2020	14-5-2020	SK Pembentukan Struktur Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada PN Cibinong Kelas I A
26	W11-U20/50/KPN.Cbi/ OT.01.3/ V/2020	13-5-2020	SK Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Nomor W11- U20/47/ KPN.Cbi/OT.01.3/V2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Bagi Hakim dan Aparatur, serta Pemberlakuan Pendaftaran Perkara Secara Online (Ecourt) Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di PN Cibinong Kelas I A
27	W11-U20/51/KPN.Cbi/ OT.01.3/ V/2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2020
28	W11-U20/52/KPN.Cbi/ PS.00/ V/2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi pada PN Cibinong Kelas I A
29	W11-U20/53/KPN.Cbi/ HM.01/ V/2020	22-5-2020	SK Penunjukan Petugas Pengelola Meja Pengaduan pada PN Cibinong Kelas I A
30	W11-U20/54/KPN.Cbi/ HM.01/ V/2020	22-5-2020	SK Penunjukan Petugas Pengelola Meja Informasi pada PN Cibinong Kelas I A
31	W11-U20/55/KPN.Cbi/ PS.02/ V/2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (Whistleblowing) di PN Cibinong Kelas I A

32	W11-U20/56/KPN.Cbi/ PS.02/ V/2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PN Cibinong Kelas I A
33	W11-U20/57/KPN.Cbi/ PS.00/ V/2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada PN Cibinong Kelas I A
34	W11-U20/58/KPN.Cbi/ PS.01/ V/2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Perkara (Minutasi) di PN Cibinong Kelas I A
35	W11-U20/59/KPN.Cbi/ HM.02.3/ V/2020	22-5-2020	SK Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) di PN Cibinong Kelas I A
36	W11-U20/60/KPN.Cbi/ HK.00/ V/2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada PN Cibinong Kelas I A
37	W11-U20/61/KPN.Cbi/ HM.01.1/ V/2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Penilai Penghargaan (Reward) pada PN Cibinong Kelas I A
38	W11-U20/62/KPN.Cbi/ OT.01.03/ V/2020	22-5-2020	SK Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
39	W11-U20/63/KPN.Cbi/ HM.00/V/ 2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Redaktur Website PN Cibinong Kelas I A 2020
40	W11-U20/64/KPN.Cbi/ HK.00/V/ 2020	22-5-2020	SK Pembentukan Struktur Pelaksana Pelayanan Jadwal Persidangan pada PN Cibinong Kelas I A
41	W11-U20/65/KPN.Cbi/ OT.00/V/ 2020	22-5-2020	SK pengangkatan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Kepaniteraan pada PN Cibinong Kelas I A
42	W11-U20/66/KPN.Cbi/ OT.00/V/ 2020	22-5-2020	SK pengangkatan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Kesekretariatan pada PN Cibinong Kelas I A

43	W11-U20/67/KPN.Cbi/ OT.00/V/ 2020	22-5-2020	SK pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Perdata pada PN Cibinong Kelas I A
44	W11-U20/68/KPN.Cbi/ OT.00/V/ 2020	22-5-2020	SK pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Pidana pada PN Cibinong Kelas I A
45	W11-U20/69/KPN.Cbi/ OT.00/V/ 2020	22-5-2020	SK pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Hukum pada PN Cibinong Kelas I A
46	W11-U20/70/KPN.Cbi/ OT.00/V/ 2020	22-5-2020	SK Pengangkatan Supervisor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di PN Cibinong Kelas I A
47	W11-U20/71/KP.Cbi/ HM.00/V/ 2020	22-5-2020	SK Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) Pada PN Cibinong Kelas I A an Amran S. Herman, S.H., M.H.
48	W11-U20/72/KPN.Cbi/ PS.02/V/ 2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada PN Cibinong Kelas I A
49	W11-U20/73/KPN.Cbi/ PS.02/V/ 2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Penyusunan Survei Indeks Persepsi Korupsi pada PN Cibinong Kelas I A
50	W11-U20/74/KPN.Cbi/ OT.01.3/V/ 2020	22-5-2020	SK Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
51	W11-U20/75/KPN.Cbi/ OT.01.2/V/ 2020	22-5-2020	SK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2020

52	W11-U20/76/KPN.Cbi/ HM.01.1/V/ 2020	22-5-2020	SK Pedoman Pemberian Reward and Punishment serta Pemberian Kompensasi Jasa Atas Layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
53	W11-U20/77/KPN.Cbi/ OT.01.3/V/ 2020	29-5-2020	SK Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Nomor W11-U20/50/ KPN.Cbi/OT.01.3/V2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Bagi Hakim dan Aparatur, serta Pemberlakuan Pendaftaran Perkara Secara Online (Ecourt) Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
54	W11-U20/78/KPN.Cbi/ HK.02/VI/ 2020	02-06-2020	SK Penunjukan Hakim Mediator PN Cibinong
55	W11-U20/80/KPN.Cbi/ KP.00.1/VI/ 2020	09-06-2020	SK Tim Baperjakat PN Cibinong
56	W11-U20/81/KPN.Cbi/ HK.02/VI/ 2020	22-06-2020	SK Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi PN Cibinong
57	W11-U20/82/KPN.Cbi/ HM.02.3/VI/ 2020	25-06-2020	SK Penunjukan Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PN Cibinong
58	W11-U20/83/KPN.Cbi/ HK.00/VI/ 2020	25-06-2020	SK Kewajiban Bagi Hakim Pengawas Bidang, Pejabat Struktural/ Fungsional, dan Staf Pelaksana Untuk Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Setiap Bulan pada PN Cibinong
59	W11-U20/84/KPN.Cbi/ HK.00/VII/ 2020	01-07-2020	Susunan Majelis Hakim, Penggunaan Ruang Sidang dan Jadwal Sidang pada PN Cibinong

60	W11-U20/85/KPN.Cbi/ HM.01.2/VII/ 2020	22-07-2020	SK Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 PN Cibinong
61	W11-U20/86/KPN.Cbi/ KP.05.8/VII/ 2020	23-07-2020	SK Tim Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model Tahun 2020 di PN Cibinong
62	W11-U20/87/KPN.Cbi/ KP.05.8/VII/ 2020	30-07-2020	SK Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Periode Bulan Juli s.d. Desember 2020
63	W11-U20/88/KPN.Cbi/ HK.02/VIII/ 2020	11-08-2020	SK Hakim Mediator PN Cibinong
64	W11-U20/89/KPN.Cbi/ HK.02/VIII/ 2020	14-08-2020	SK Panjar Biaya Perkara
65	W11-U20/91/KPN.Cbi/ KP.04.5/VIII/ 2020	31-08-2020	SK Pengangkatan JSP an Yoyoh & Suratman
66	W11-U20/92/KPN.Cbi/ OT.01.3/IX/ 2020	08-09-2020	SK Penetapan Jadwal WFH bagi Majelis Hakim PN Cibinong
67	W11-U20/93/KPN.Cbi/ OT.01.3/IX/ 2020	08-09-2020	SK Penetapan Jadwal WFH bagi ASN PN Cibinong
68	W11-U20/94/KPN.Cbi/ OT.00/VII/ 2020	30-07-2020	SK Pembentukan Tim Penjaminan Mutu PN Cibinong
69	W11-U20/95/KPN.Cbi/ PS.01/VII/ 2020	30-07-2020	SK Penunjukan & Penugasan Hakim Pengawas Bidang PN Cibinong
70	W11-U20/96/KPN.Cbi/ PS.01/VII/ 2020	30-07-2020	SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Sebagai Asesor Internal Secara Sistem Silang (Cross Audit) pada PN Cibinong
71	W11-U20/97/KPN.Cbi/ HM.00/IX/ 2020	23-09-2020	SK penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
72	W11-U20/98/KPN.Cbi/ KS.00/IX/ 2020	23-09-2020	SK pedoman pelaksanaan penggunaan pakaian dinas dan tanda pengenal bagi Hakim dan Aparatur

			Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
73	W11-U20/99/KPN.Cbi/OT.01.3/IX/2020	23-09-2020	SK Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
74	W11-U20/100/KPN.Cbi/OT.01.3/IX/ 2020	23-09-2020	SK Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
75	W11-U20/101/KPN.Cbi/HK.02/IX/ 2020	30-09-2020	SK Penetapan Mediator Non Hakim di PN Cibinong
76	W11-U20/102/KPN.Cbi/HK.02/IX/ 2020	30-09-2020	SK Penetapan Jadwal, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
77	W11-U20/103/KPN.Cbi/KP.04.5/X/ 2020	08-10-2020	SK Rolling an Eka Ali Askap sbg Ajudan WKPN Cibinong
78	W11-U20/104/KPN.Cbi/OT.00/IX/ 2020	30-09-2020	SK Tim Budaya Kerja 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rawat, dan Rajin) dan 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
79	W11-U20/105/KPN.Cbi/OT.01.3/ IX/2020	30-09-2020	SK Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Pengunjung Sidang/Tamu Di PN Cibinong Kelas I A
80	W11-U20/106/KPN.Cbi/KP.04.5/X/ 2020	08-10-2020	SK Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PN Cibinong Kelas I A an Ranga Widyarachman, S.H., M.H.
81	W11-U20/107/KPN.Cbi/OT.00/IX/ 2020	30-09-2020	SK Tim Pendukung Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
82	W11-U20/110/KPN.Cbi/OT.01.3/X/ 2020	01-10-2020	SK Pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi

			Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang terindikasi Positif Covid-19 di PN Cibinong
83	W11-U20/112/KPN.Cbi/KP.04.5/ XI/2020	03-11-2020	SK Rolling an Suratman ke Pidana
84	W11-U20/113/KPN.Cbi/KP.04.5/ XI/2020	03-11-2020	SK Rolling Honorer an Edy Widodo ke Perdata
85	W11-U20/114/KPN.Cbi/KP.04.5/ XI/2020	03-11-2020	SK Rolling Honorer an Rizkia Novariantie ke Hukum
86	W11-U20/115/KPN.Cbi/KP.04.5/ XI/2020	03-11-2020	SK Rolling Honorer an Atang Suherman ke Umum
87	W11-U20/121/KPN.Cbi/HM.00/XII/2020	15-12-2020	SK penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A

BAB IV

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni

- DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.613519/2020 dengan Pagu sebesar Rp. 12.223.681.000,-
- DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA-005.03.2.613520/2020 dengan PAGU sebesar Rp.486.860.000,-

selama Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan 5 (lima) kali revisi untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.613519/2020 dan 3 (lima) kali revisi DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA-005.03.2.613520/2020.

Tabel 19. DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
Tahun Anggaran 2020

NO	Revisi	Tanggal	Nilai (dalamRp.)	Keterangan
DIPA 01				
Nilai Awal			12.223.681.000,-	
1	Revisi ke-1	31/03/2020	12.223.681.000,-	Merubah akun Dalam dana anggaran Merubah Pejabat Keuangan
2	Revisi ke-2	02/07/2020	12.247.081.000,-	Untuk perubahan Akun jasa kebersihan
3	Revisi ke-3	27/10/2020	12.364.081.000,-	Untuk Revisi Belanja Modal
4	Revisi ke-4	13/11/2020	12.364.081.000,-	Untuk Optimalisasi Anggaran Belanja Barang
5	Revisi ke-5	23/12/2020	13.228.921.000,-	Untuk tambahan belanja pegawai sebesar

**Tabel 20. Revisi DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
Tahun Anggaran 2020**

NO	Revisi	Tanggal	Nilai (dalamRp.)	Keterangan
DIPA 01				
Nilai Awal			12.223.681.000,-	
1	Revisi ke-1	31/03/2020	12.223.681.000,-	Merubah akun Dalam dana anggaran Merubah Pejabat Keuangan
2	Revisi ke-2	02/07/2020	12.247.081.000,-	Untuk perubahan Akun jasa kebersihan
3	Revisi ke-3	27/10/2020	12.364.081.000,-	Untuk Revisi Belanja Modal
4	Revisi ke-4	13/11/2020	12.364.081.000,-	Untuk Optimalisasi Anggaran Belanja Barang
5	Revisi ke-5	23/12/2020	13.228.921.000,-	Untuk tambahan belanja pegawai sebesar

DIPA 03				
Nilai Awal			486.860.000,	
1	Revisi ke 1	08/10/2020	486.860.0000,	Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan
2	Revisi ke-2	02/11/2020	386.860.000,-	Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung
3	Revisi ke 3	01/12/2020	386.860.000,	Optimalisasi Anggaran Dan perbaikan akun

B. ANGGARAN PAGU DAN REALISASI

PAGU dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 (Badan Urusan Administrasi) Sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai PAGU 01 (BUA) Sebesar Rp.9.309.565.000
Realisasi sebesar Rp. 9.269.052.196 (99,56%)
Sisa Rp. 40.512.804 (04,44%)
2. Belanja Barang PAGU 01 (BUA) Sebesar Rp. 2.368.629.000
Realisasi sebesar Rp. 2.366.609.558 (99,92%)
Sisa Rp. 1.938.442 (0,08%)
3. Belanja Modal PAGU 01 (BUA) Sebesar Rp. 1.550.727.000
Realisasi sebesar Rp. 1.541.747.800 (99,42%)
Sisa Rp. 8.979.200 (0,58%)

PAGU dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 (Badan Peradilan Umum) Sebagai berikut :

1. Belanja Barang PAGU 03 Sebesar Rp. 386.860.000
Realisasi sebesar Rp. 375.673.940 (97,11%)
Sisa Rp. 11.186.060 (2,89%)



PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	005-613519	PENGADILAN NEGERI KAB. BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	023	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	9.309,565,000 9,269,052,196 (99,56%) 40,512,804	2.368,629,000 2,366,690,558 (99,92%) 1,938,442	1.550,727,000 1,541,747,800 (99,42%) 8,979,200	0 0,00% 0	0 0,00% 0	0 0,00% 0	0 0,00% 0	0 0,00% 0	0 0,00% 0	0 0,00% 0	13,228,921,000 13,177,490,554 (99,61%) 51,430,446
TOTAL					PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	9.309,565,000 9,269,052,196 (99,56%) 40,512,804	2.368,629,000 2,366,690,558 (99,92%) 1,938,442	1.550,727,000 1,541,747,800 (99,42%) 8,979,200	0 (0,00%) 0	0 (0,00%) 0	0 (0,00%) 0	0 (0,00%) 0	0 (0,00%) 0	0 (0,00%) 0	13,228,921,000 13,177,490,554 (99,61%) 51,430,446



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI KAB BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	005-613520	PENGADILAN NEGERI KAB BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	023	PAGU REALISASI PERSENTASE	0 0.00%	386,860,000 375,673,940 (97.11%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	386,860,000 375,673,940 (97.11%)
TOTAL					PAGU REALISASI PERSENTASE	0 (0.00%)	386,860,000 375,673,940 (97.11%)	0 (0.00%)	386,860,000 375,673,940 (97.11%)						
					SISA	0	11,186,060	0	0	0	0	0	0	0	11,186,060

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Prasarana Gedung

Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong mulai dibangun tahun 1997 di atas tanah seluas. 7.315 M². Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cibinong terdiri dari 2 lantai dengan Luas 3.037 M² senilai **Rp. 8.698.525.000,-**

Gambar 2. Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 3. Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 4. Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 5. Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 6 Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 7 Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 8. Area Merokok Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah :

- a. Ruang Pelayanan, terdiri dari :
 - 4 (empat) ruang sidang dewasa;
 - 1 (satu) ruang sidang anak;
 - 1 (satu) ruang teleconference korban/saksi anak;
 - 1 (satu) ruang tunggu ramah anak;
 - 2 (dua) ruang mediasi ;
 - 2 (dua) ruang kaukus;
 - 1 (satu) ruang tahanan Pria;
 - 1 (satu) ruang tahanan wanita;
 - 1 (satu) ruang Pelayanan PTSP dan Penjadwalan Sidang;
 - 2 (satu) ruang tunggu sidang;
 - 1 (satu) ruang tunggu Jaksa;
 - 1 (satu) ruang perpustakaan;
 - 1 (satu) ruang menyusui;

1 (satu) ruang kesekretariatan APM;

1 (satu) ruang pos bantuan hukum;

b. Ruang kerja, terdiri dari :

1 (satu) Ruang Kerja Ketua;

1 (satu) Ruang Kerja Wakil Ketua;

4 (empat) Ruang Kerja Hakim;

1 (satu) Ruang Kerja Panitera;

1 (satu) Ruang Kerja Sekretaris;

2 (dua) Ruang Kerja Panitera Pengganti;

1 (satu) Ruang Kerja Jurusita;

1 (satu) Ruang Kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan;

1 (satu) Ruang Kerja Sub Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana;

1 (satu) Ruang Kerja Sub Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan;

1 (satu) Ruang Kerja Kepaniteraan Pidana;

1 (satu) Ruang Kerja Kepaniteraan Perdata;

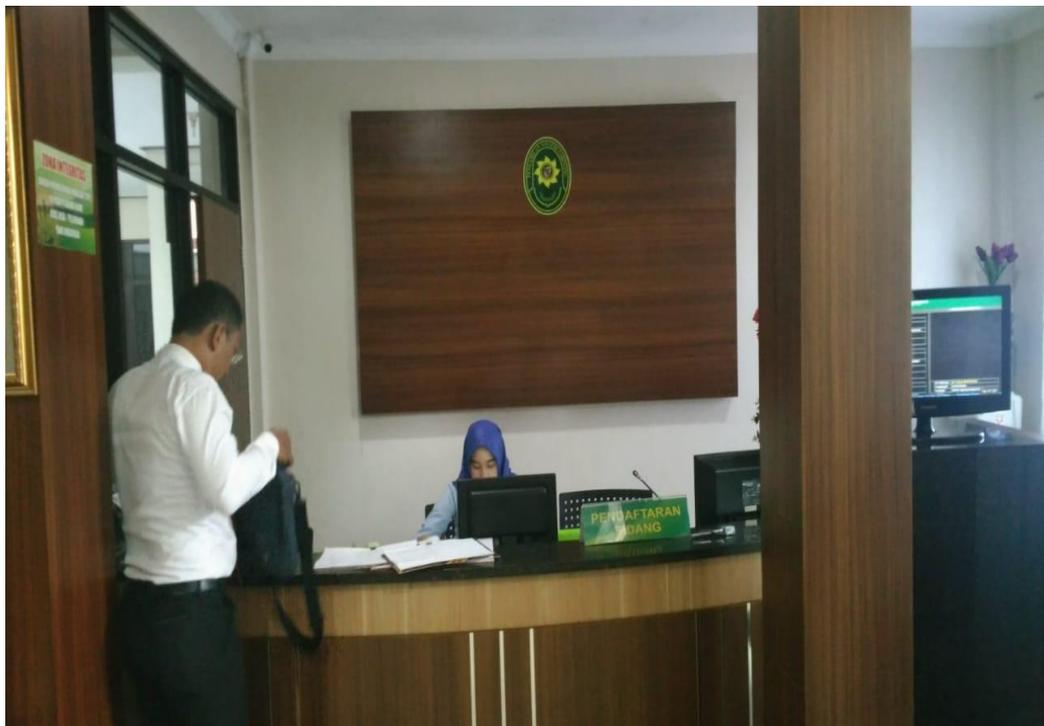
1 (satu) Ruang Kerja Kepaniteraan Hukum.

4 (empat) ruang arsip yang terdiri dari 2 ruang arsip pidana dan 2 ruang arsip perdata.

Gambar 9. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 10. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 11. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 12. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 13. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 14 Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 15 Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 16 Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 17 Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 18 Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 19 Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 20. Ruang Kerja Ketua



Gambar 21. Ruang Kerja Wakil Ketua



Gambar 22. Ruang Kerja Wakil Ketua



2. BIDANG TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN

- a. Manajemen surat masuk dan surat keluar sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang cukup berarti.
- b. Untuk Pengarsipan Surat sudah berjalan baik dan tidak ada kendala dimana arsip surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua atau Panitera/Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian Umum.
- c. Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2020 adalah sebesar 6624 buah surat sedangkan untuk surat keluar sebesar 6675 buah surat.
- d. Bukubuku Register surat masuk dan surat keluar beserta bukubuku ekspedisinya tersimpan rapi di sub bagian umum.

3. BIDANG PERPUSTAKAAN

- a. Buku Perpustakaan yang baru sudah dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN
- b. Buku-buku Perpustakaan sudah diberikan Label Tunjuk setempat, Kantong buku dan diberikan stempel stambuk dan Milik Perpustakaan
- c. Pemeliharaan Buku perpustakaan sudah dilakukan dengan baik dan tertata dengan rapi serta pemberian kamper dan pembersihan ruangan dan buku dengan vacuum cleaner sudah dilakukan.
- d. Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2020 sebesar 2.760buku.
- e. Buku Induk Perpustakaan, Buku Peminjaman, Buku Tamu, Buku Penerimaan sudah dilaksanakan.
- f. Katalog Perpustakaan terus dilengkapi

4. BIDANG BARANG MILIK NEGARA (BMN)

- a. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen akutansi Barang Milik Negera) sudah berjalan baik dengan operator SIMAK BMN adalah Abdul Choir dibantu dengan Agung Devyanto,A.Md.
- b. Laporan SIMAK BMN Semesteran dan tahunan Sudah dikirim sesuai waktu yang ditetapkan.

- c. Nilai Total Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Cibinong sebesar per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 94.559.488.944 ,**
- d. Tanah senilai **Rp. 82.437.445.000,**

Tabel 21. Aset Tanah yang Dimiliki Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2020

No	Keterangan Tanah	Luas	Nilai Perolehan / Taksiran (Rp)	Alamat	Bukti Kepemilikan
1	Tanah Gedung Kantor	5.315 m2	53.017.125.000	Jl. Tegar Beriman No.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 42 An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI tanggal 11/09/2009
2	Tanah Rumah Dinas	995 M2	5.994.824.000	JL. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 2 (a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25/10/1997)
3	Tanah Rumah Dinas	2.393 m2	3.475.496.000	JL. Sirojul Munir/Kp. Cikempong Rt.002/Rw.09, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 6298 (a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 09/6/2014)
4	Tanah Kantor PN. Cibinong Hibah dari Pemkab. Bogor	2.000 m2	19.950.000.000,	Jl. Tegar Beriman No.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 48 An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI tanggal 27/09/2013

e. **Rumah Dinas 5 Unit** terdiri dari :

**Tabel 22. Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cibinong
Tahun Anggaran 2020**

No	Type Rumah Dinas	Luas Tanah	Luas Bangunan	Alamat	Keterangan Penghuni
1	Rumah dinas Golongan I Type C permanen	200 M2	70 M2	Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Kosong
2	Rumah dinas Golongan I Type C permanen	200 M2	70 M2	Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Kosong
3	Rumah dinas Golongan I Type C permanen	200 M2	70 M2	Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Kosong
4	Rumah dinas Golongan I Type C permanen	200 M2	50 M2	Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Kosong
5	Rumah dinas Golongan I Type C permanen	195 M2	50 M2	Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Kosong

- f. **Mobil Dinas 7 Unit** (BPKB ada di Brankas Bendahara Pengeluaran) terdiri 5 unit sebagai BMN milik kantor Pengadilan Negeri Cibinong, 2 Unit BMN milik Pemkab Bogor (pinjam pakai). Berikut keterangan untuk ke 7 unit mobil dinas tersebut :

Tabel 23.
Data Kendaraan Roda 4 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020

No	Merk/Type Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nilai Perolehan	Keterangan/Pengguna
1	Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2008	2008	F 1342 F	Rp.160.868.328,	Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.
2	Mobil Toyota Kijang KF 83 LSX Tahun 2003	2003	F 1158 F	Rp.118.726.000,	Tasdik, S.H., M.H.
3	Mobil Toyota Kijang KF 83 LGX Tahun 2004	2004	F 3 F	Rp.110.210.000,	Linda Cahyati
4	Mobil Sedan Proton Tahun 2010	2010	F 1224 G	Rp.152.274.000,	Dimas Lingga Wicaksana, S.H.
5	Mobil Toyota Avanza Tahun 2011	2011	F 1533 F	Rp.168.500.000,	Rio Grace E Sitompul,S.Kom. ,M.Kom
6	Mobil Toyota Fortuner	2014	F 1219 G		Irfanudin, S.H., M.H.
7	Mobil Mitsubishi Outlander	2012	F 1690 F		Darius Naftali, S.H., M.H.

g. Motor Dinas 7 Unit

Tabel 24.
Data Kendaraan Roda 2 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020

No	Merk/Type Kendaraan	Tahun	Nomor Polisi	Keterangan/Pengguna
1	Honda Supra 125 D	2005	F 4287 F	Thantowi Rais
2	Mega Pro	2006	F 4636 F	Tasdik, S.H., M.H.
3	Mega Pro	2006	F 4695 F	M.irfan nurdin, S.kom.
4	Honda Supra 125	2007	F 4474 F	Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.
5	Honda Supra 125	2008	F 4697 F	Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom., M.Kom.
6	Honda Supra 125	2008	F 4698 F	Irfanudin, S.H., M.H.
7	Honda Supra 125 FI	2011	F 3088 G	Riyanto, S.H., M.H.

- h. AC Split : 47 Unit
- i. Komputer : 49 Unit
- j. Laptop : 7 Unit
- k. Note Book : 1 Unit
- l. Printer : 36 Unit
- m. Handicam : 2 Unit (1 Unit Rusak)

n. Infocus	: 1	Unit (Rusak)
o. Mesin Genset	: 2	1 Unit (Rusak Ringan)
p. PABX	: 1	Unit
q. Handy Talky	: 6	Unit
r. Mesin Absen	: 1	Unit (Rusak Ringan)
s. Tabung Pemadam Api	: 7	Unit (Perlu Isi Ulang)
t. Mesin Fax	: 2	Unit
u. Mesin Ketik	: 4	Unit (Rusak)
v. Lemari Besi	: 24	Unit (5 Rusak)
w. Filling Kabinet	: 18	Unit (5 Rusak)
x. Meja Kerja	: 141	Unit
y. Kursi Besi Metal	: 233	Unit
z. Kursi Roda	: 1	Unit
aa. Vacuum Cleaner	: 1	Unit (Rusak)
bb. Sound Sistem	: 3	Unit (1 Unit Rusak)
cc. Server	: 1	Unit
dd. Jaringan LAN	: 1	Paket
ee. CCTV	: 32	Unit
ff. DVR CCTV	: 1	Unit

Dan barangbarang lain yang tidak masuk dalam Simak BMN

5. BIDANG KEAMANAN

- a. Pengamanan Kantor dilakukan oleh 4 (empat) Orang Petugas Pamfik (Honoror). Pembagian kerja dilakukan dalam 2 (dua) shift. Untuk pengamanan kantor pada shift pertama dijaga oleh 3 (tiga) orang Pamfik sedangkan untuk shift ke-2 yaitu pada malam hari, pengamanan kantor dilakukan oleh 1 (satu) orang Pamfik dibantu dengan 1 (satu) orang honoror ruangan. Jadwal pengamanan kantor sudah dibuat oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan yaitu secara bergiliran Pamfik mendapat libur (off) selama 1 (satu) hari setelah bertugas selama 24 jam.

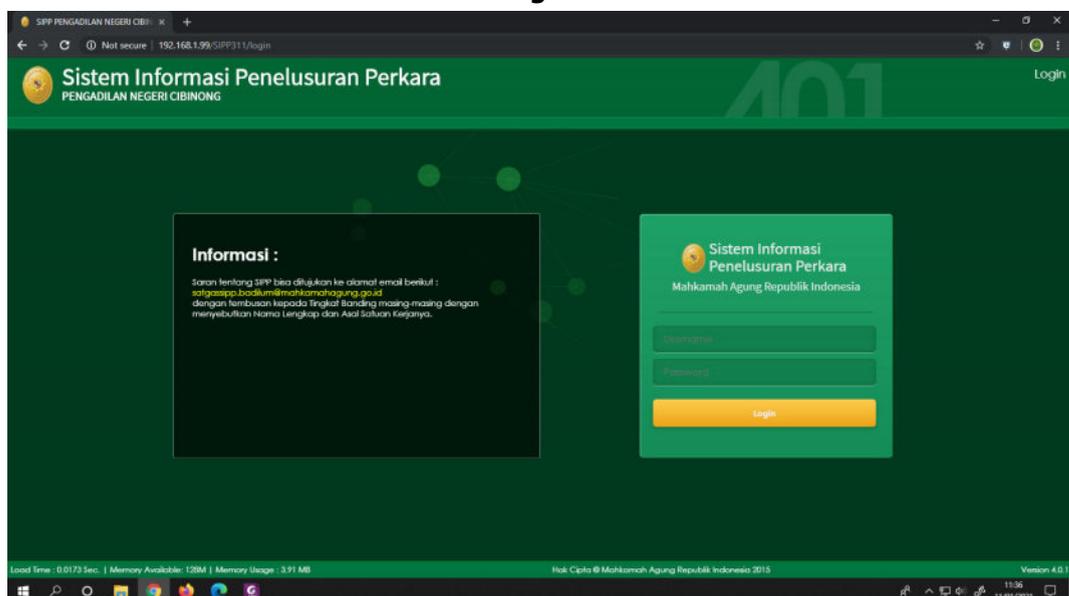
- b. Buku Laporan PAMFIK diisi setiap hari yaitu ketika petugas pengamanan berganti shift. Buku laporan dibaca dan diparaf oleh petugas yang telah ditunjuk dan disahkan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

1. Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Cibinong

Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara atau SIPP adalah aplikasi penyedia informasi kepada masyarakat umum atau para pihak mengenai perkara. Pengguna dapat menggunakan aplikasi SIPP sebagai media informasi, media penelitian dan media penelusuran perkara. Hingga saat ini aplikasi SIPP telah menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Cibinong. Aplikasi SIPP yang terpasang pada Pengadilan Negeri Cibinong selalu menyesuaikan dengan versi yang terinstall. Pada saat ini versi terbaru yang sudah terinstall yaitu SIPP versi 4.0.1

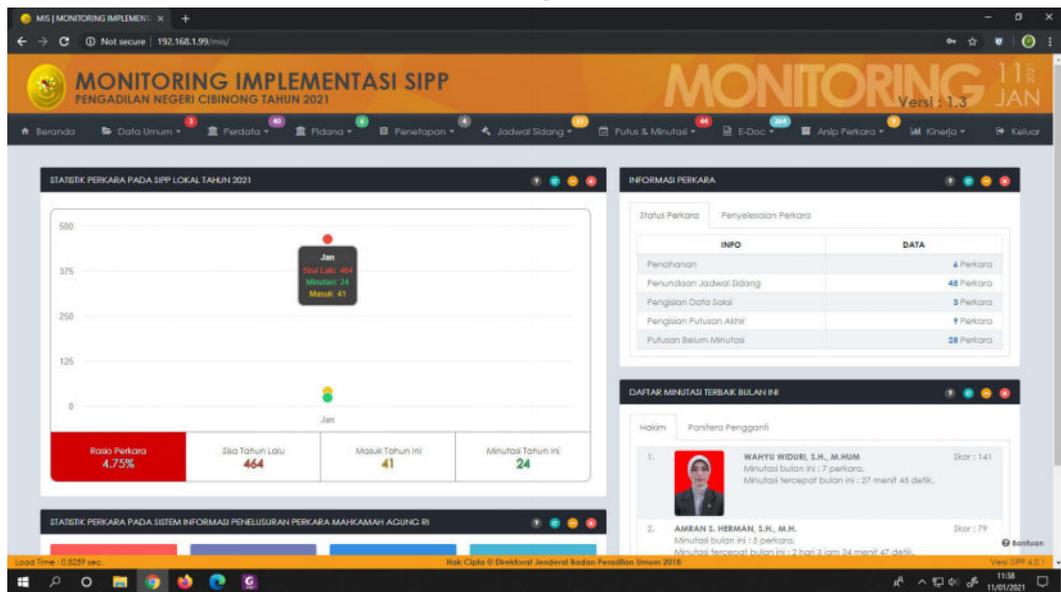
Gambar 23. Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Cibinong Kelas IA



Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sudah terinstall di setiap PC ataupun Laptop masing-masing Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Petugas admin tiap kepaniteraan, admin dan staff PTIP. Selain itu juga kepatuhan dalam penginputan perkara pada SIPP selalu di pantau

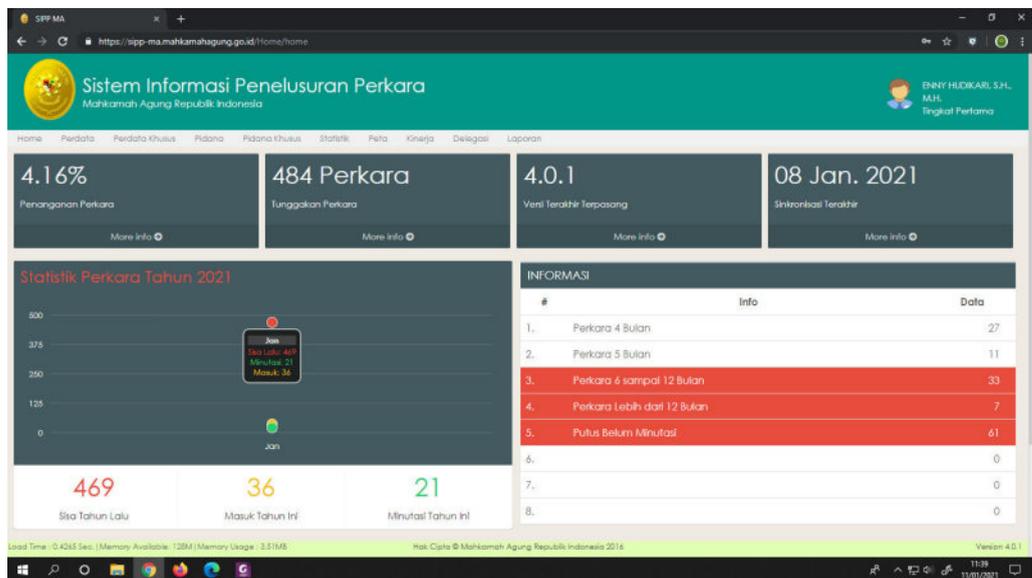
oleh pimpinan dan unsur pimpinan melalui Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi MIS yang sudah ter-install pada PN Cibinong adalah mengikuti versi terupdate yaitu versi 1.3

Gambar 24 Monitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) PN Cibinong Kelas IA

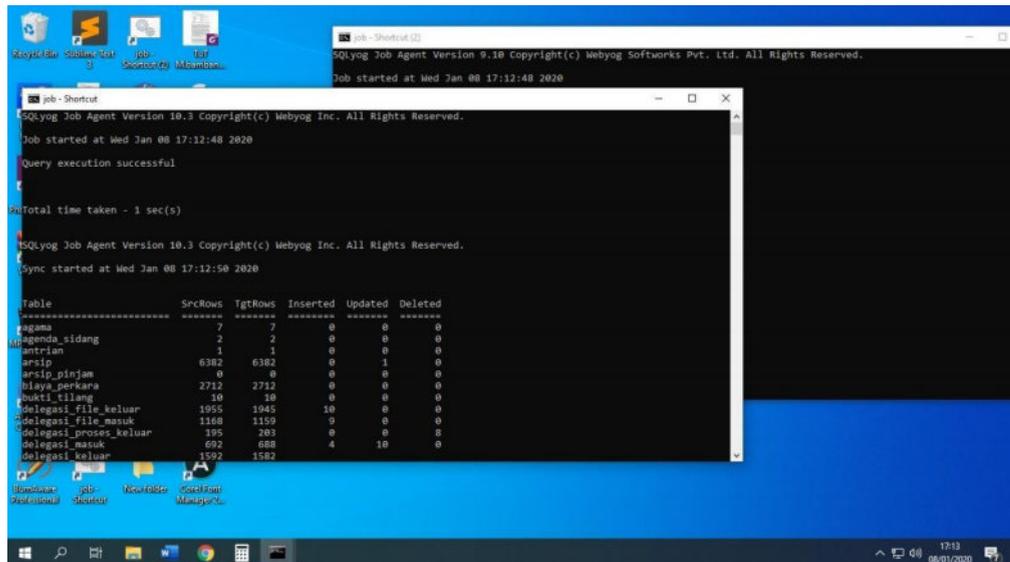


Proses sinkronisasi data ke Database Mahkamah Agung RI dilakukan oleh staf PTIP yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan Surat Keputusan (SK). Sinkronisasi data dilakukan 3 (tiga) kali dalam setiap hari dengan waktu sinkronisasi yang dipilih dan dianggap tepat oleh Tim PTIP. Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan data yang ada pada Database Lokal pada Pengadilan Negeri Cibinong sama dengan Database yang ada pada SIPP Mahkamah Agung RI sehingga publik dapat mengakses data perkara ter-update

Gambar 25 Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Cibinong Kelas IA Pada Mahkamah Agung RI



Gambar 26 Proses Sinkronisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Cibinong Kelas IA



2. Implementasi Era Terang pada Pengadilan Negeri Cibinong

ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Cibinong yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri Cibinong. Aplikasi Surat Layanan Elektronik Ini Dibuat Untuk Tujuan Sebagai Berikut :

Mempermudah Masyarakat dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan.

Bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satker.

Adapun Surat Keterangan Yang Dapat Dibuat Di Aplikasi Eraterang Ini Sebagai Berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit.
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Adapun jumlah surat keterangan yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 1067 surat dan terlihat pada gambar tangkap layar dibawah ini.

Gambar 27 Tangkap Layar Jumlah Surat Keterangan yang masuk pada Aplikasi Era Terang PN Cibinong Kelas IA

No	Tgl Permohonan	Nama Pemohon	Jenis Surat Keterangan	Proses	Nomor Register	Detail
1	18/03/2020	NEURUL ARI ANWAR	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	85/SK/NK/03/2020/PN Cbi	[Detail] [Print] [Refresh] [Close]
2	18/03/2020	GLANG HAULANA	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	79/SK/NK/03/2020/PN Cbi	[Detail] [Print] [Refresh] [Close]
3	18/03/2020	NEURUL HAULANA	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	76/SK/NK/03/2020/PN Cbi	[Detail] [Print] [Refresh] [Close]
4	04/02/2020	RIATU LESYANIE PUTRI	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	25/SK/NK/02/2020/PN Cbi	[Detail] [Print] [Refresh] [Close]
5	22/01/2020	ALUAKBARFAIZY	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	13/SK/NK/01/2020/PN Cbi	[Detail] [Print] [Refresh] [Close]
6	18/01/2020	Nalderasagaf	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	10/SK/NK/01/2020/PN Cbi	[Detail] [Print] [Refresh] [Close]
7	09/12/2019	SUPRIATNA	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	3459/SK/NK/12/2019/PN Cbi	[Detail] [Print] [Refresh] [Close]
8	18/09/2019	HANZAH AENUROFK	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	3488/SK/NK/09/2019/PN Cbi	[Detail] [Print] [Refresh] [Close]
9	18/09/2019	ANDIKA EDWIN RAHLEVI	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	3485/SK/NK/09/2019/PN Cbi	[Detail] [Print] [Refresh] [Close]
10	17/09/2019	Jayani Hendekawati	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya	Selesai	3483/SK/NK/09/2019/PN Cbi	[Detail] [Print] [Refresh] [Close]

3. Implementasi E Court pada Pengadilan Negeri Cibinong

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

e-Litigation (Persidangan secara online)

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.

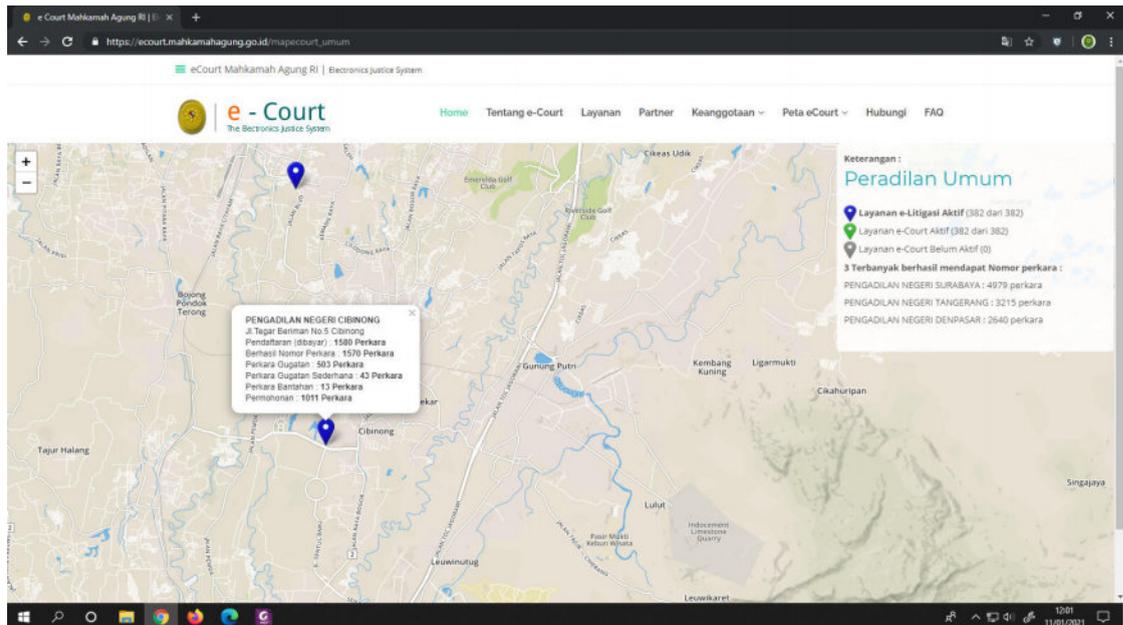
Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, terdapat 1.208 perkara perdata baik Gugatan maupun Permohonan yang sudah terdaftar melalui aplikasi ecourt baik melalui efilling, epayment dan esummons, dengan rincian sebagai berikut :

Perkara Gugatan	378	Perkara
Perkara Gugatan Sederhana	27	Perkara
Perkara Bantahan	13	Perkara
Perkara Permohonan	790	Perkara

Berikut adalah gambar PN Cibinong pada peta ecourt Mahkamah Agung RI

Gambar 28 Tangkap Layar Peta Aplikasi Era Terang PN Cibinong Kelas IA



BAB V

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi penjaminan mutu tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan-perbaikan disegala bidang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten guna mempermudah dan memperlancar pelayanan prima.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas Sumber Daya Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA perlu memiliki sistem

manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Cibinong.

Tabel berikut menggambarkan pencapaian Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam hal penjaminan mutu :

Tabel 25. Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Cibinong

NO	TANGGAL PEMBERIAN SERTIFIKAT	SERTIFIKASI
1	22 Desember 2015	Sertifikasi ISO 9001:2008
2	14 September 2016	Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilum MA RI dengan predikat "A" Excellence
3	24 Juli 2017	Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilum MA RI dengan predikat "A" Excellence

Hal ini bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk bagi Pengadilan Negeri Cibinong agar dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Cibinong : "SIMPATIK", yakni Sinergi Integritas Mandiri Profesional Akuntabel Transparan Inovatif dan Kompeten. Maka dengan pencapaian yang telah diperoleh tersebut Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA akan semakin berusaha untuk melakukan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat pencari keadilan. (Dokumen Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu terlampir)

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sudah diatur dalam Buku II, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta untuk mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/Pejabat Pengadilan yang kurang transparan di hadapan publik, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan pengadilan yang prima yakni peradilan sederhana, murah, akuntabel, responsibility, efektif, efisien dan ekonomis sebagaimana menjadi motto Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta tidak terjadi KKN di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Nomor : W11-U20/128/KPN.Cbi/OT.00/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk selanjutnya disebut SK Ketua Pengadilan, maka jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut, meliputi:

1) Kepaniteraan Pidana

- ✓ Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- ✓ Pendaftaran permohonan praperadilan;
- ✓ Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- ✓ Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- ✓ Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- ✓ Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan;

- ✓ Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
- ✓ Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelalangan barang bukti;
- ✓ Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
- ✓ Penerimaan permohonan pembantaran;
- ✓ Penerimaan permohonan izin besuk;
- ✓ Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

2) Kepaniteraan Perdata

- ✓ Pendaftaran perkara gugatan biasa;
- ✓ Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
- ✓ Pendaftaran vernet atas putusan verstek;
- ✓ Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
- ✓ Pendaftaran perkara permohonan;
- ✓ Pendaftaran penerimaan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- ✓ Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- ✓ Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- ✓ Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
- ✓ Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- ✓ Pendaftaran permohonan eksekusi;
- ✓ Pendaftaran permohonan konsinyasi;
- ✓ Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- ✓ Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;
- ✓ Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

3) Kepaniteraan Hukum

- ✓ Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
- ✓ Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
- ✓ Permohonan pendaftaran penolakan waris;
- ✓ Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
- ✓ Permohonan melaksanakan penelitian dan riset ;
- ✓ Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- ✓ Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- ✓ Permohonan pendaftaran legalisasi dan kelahiran;
- ✓ Permohonan legalisasi surat;
- ✓ Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
- ✓ Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
- ✓ Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya.

4) Umum dan Keuangan

- ✓ Penerimaan surat masuk;
- ✓ Penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grati.

BAB VI

BAB VI

PENGAWASAN INTERNAL DAN EVALUASI

A. PENGAWASAN INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah. Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini:

NO	NAMA HAKIM PENGAWAS BIDANG	BIDANG PENGAWASAN	URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN
1	2	3	4
I BIDANG KEPANITERAAN			
1.	LUCY ERMAWATI, S.H.	Kepaniteraan Pidana, terkait perkara pidana biasa/khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib administrasi perkara pidana Biasa/Khusus, tilang, tipiring dan praperadilan ➤ Tertib administrasi khususnya penyerahan/penyampaian salinan putusan serta mutasi berkas ➤ Tertib administrasi upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali serta grasi ➤ Pengawasan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Kepaniteraan Pidana Biasa/Khusus
2.	RINA ZAIN, S.H.	Kepaniteraan Pidana, terkait perkara pidana anak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib administrasi perkara pidana anak, korban anak, penahanan, diversi dan register ➤ Tertib administrasi khususnya penyerahan/penyampaian salinan putusan serta mutasi berkas ➤ Tertib administrasi upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali serta grasi ➤ Pengawasan sarana dan prasarana Pengadilan Ramah Anak ➤ Pengawasan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Kepaniteraan Pidana Anak

NO	NAMA HAKIM PENGAWAS BIDANG	BIDANG PENGAWASAN	URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN
1	2	3	4
3.	INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.	Kepaniteraan Perdata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib administrasi keuangan perkara pihak ke-3 ➤ Tertib administrasi perkara perdata gugatan, permohonan dan perlawanan (seluruh register perkara perdata) ➤ Tertib administrasi upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, baik gugatan maupun permohonan ➤ Tertib administrasi eksekusi putusan ➤ Pengawas mediasi ➤ Tertib administrasi minutas putusan dan penyerahan salinan putusan ➤ Pengawasan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Kepaniteraan Perdata
4.	LIENA, S.H., M.Hum.		
5.	BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H.		
6.	ERLINAWATI, S.H.	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengawas Jurusita/Jurusita Pengganti b) Aplikasi e-Court 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib administrasi panggilan (intern dan delegasi) ➤ Pengawasan pelaksanaan layanan aplikasi e-Court
7.	EDUWARD, S.H., M.H.	a) Kepaniteraan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib administrasi pendaftaran surat kuasa, surat keterangan tidak dipidana, direktori putusan, pencatatan badan hukum, legalisasi waris, aplikasi SIWAS, dan tugas-tugas lain yang menjadi wewenang Kepaniteraan Hukum
8.	WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum.	<ul style="list-style-type: none"> a) Kepaniteraan Hukum b) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib administrasi arsip perkara ➤ Pengawasan pelaksanaan layanan Posbakum

NO	NAMA HAKIM PENGAWAS BIDANG	BIDANG PENGAWASAN	URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN
1	2	3	4
II BIDANG KESEKRETARIATAN			
9.	CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.	Sub Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebersihan/kerapihan seluruh kantor termasuk tertib administrasi surat-surat masuk/keluar ➤ Inventaris barang milik Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A/inventaris milik Negara ➤ Pengawas kebersihan kantor ➤ Pengawas Honorer
10.	IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.		
11.	PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.	Sub Bagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib administrasi pengelolaan keuangan
12.	WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.		
13.	NUSI, S.H., M.H.	Sub Bagian Kepegawaian,	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib administrasi kepegawaian
14.	FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.	Organisasi, dan Tata Laksana	
15.	ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H., M.H.	a) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan
16.	ZULKARNAEN, S.H.	b) Pengawas Panitia Pengganti c) Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan dalam hal kepatuhan penginputan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ➤ Pengawasan terhadap pelaksanaan Zona Integritas (ZI) dan Reformasi Birokrasi
17.	AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.	a) Humas b) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib administrasi kehumasan ➤ Pengawasan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

1. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:
 - Monitoring dan Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
 - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Cibinong
 - Laporan minutası perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan
2. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jusrita/Jusrita Pengganti dan Honorer untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
3. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.
4. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera/Sekretaris.
5. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

A. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA baik dengan

pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretaratan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Pengadilan Negeri Cibinong berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi pada Pengadilan.
 - a. Penyajian informasi yang menggunakan medium website sistem informasi yang dikembangkan Mahkamah Agung seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang selalu *update* dengan rilis versi terbaru dari Mahkamah Agung RI.
 - b. Monitoring Implementasi SIPP yang sudah di *install* disetiap laptop/komputer unsur pimpinan dan seluruh unsur yang terkait dengan SIPP sehingga memudahkan pemantauan pengisian SIPP.
 - c. E Court sudah disosialisasikan kepada para Advokat yang tergabung pada PERADI dan KAI dan juga sudah diterapkan pada Pengadilan Negeri Cibinong. Dan pada tanggal 31 Desember tercatat jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Cibinong melalui aplikasi E Court sebanyak 1.208 perkara.
3. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan menjadi unggulan yaitu:

- Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui website : www.pn-cibinong.go.id dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Cibinong .
 - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Cibinong yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak *akuntable*. PTSP perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Cibinong dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan *core business* maupun *process business* yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.
 - Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan disatu pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja Informasi dan Meja Pengaduan.
 - Sistem “Nomor Antrian Sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalulintas.
 - Pengiriman petikan putusan kepada terdakwa/Penasehat Hukum, Kejaksaan dan Penyidik telah terlaksana 100%.
4. Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2020, Pengadilan Negeri Cibinong telah: menyelesaikan perkara sebagai berikut:
- a. Perkara Pidana :
- Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2020 sebanyak 19.499 perkara, yang terdiri dari 165 perkara sisa tahun 2019 dan 19.329 perkara baru Tahun 2020.

- Dari 19.949 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 19.949 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2020 mencapai 99,28%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah berhasil menyelesaikan 114 Perkara dari 898 yang ditangani atau mencapai 44,71%. Terdapat 176 perkara yang belum dapat diputus dikarenakan sebagian besar dari perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember 2020.
- Untuk program tunggakan minutasasi, dari 19.353 Perkara Pidana yang telah diputus, 19.239 perkara telah berhasil minutasasi (99,77%).
- Sisa Perkara Pidana Tahun 2020 yang masih berjalan sampai akhir tahun 2020 sebanyak 176 Perkara.

b. Perkara Perdata :

- Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2020 sebanyak 1.415 perkara, dan perkara yang diputus adalah sebanyak 1.169 perkara, dan 246 sisa perkara yang masih berjalan di akhir tahun 2020.
- Dari 1.415 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.169 Perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara perdata Tahun 2020 mencapai 82,61%.
- Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 1.169 Perkara Perdata yang telah diputus, 1.157 diantaranya telah berhasil minutasasi.

5. Untuk Pengarsipan Surat sudah berjalan baik dan tidak ada kendala dimana arsip surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua, Wakil Ketua, Panitera atau Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian Umum. Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2020 adalah sebesar 6624 buah surat sedangkan untuk surat keluar sebesar 6675 buah surat.

6. Buku Perpustakaan yang baru sudah dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN. Buku-buku Perpustakaan sudah diberikan Label Tunjuk setempat, Kantong buku dan diberikan stempel stambuk dan Milik Perpustakaan. Pemeliharaan Buku perpustakaan sudah dilakukan dengan baik dan tertata dengan rapi serta pemberian kamper dan pembersihan ruangan dan buku dengan *vacuum cleaner* sudah dilakukan. Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2020 besar 2.760 buku.
7. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen akutansi Barang Milik Negera) sudah berjalan baik dan Laporan SIMAK BMN Semesteran dan tahunan Sudah dikirim sesuai waktu yang ditetapkan.
8. Pengamanan Kantor dilakukan oleh 4 (empat) Orang Petugas Pamfik (Honorar). Pembagian kerja dilakukan dalam 2 (dua) shift. Untuk pengamanan kantor pada shift pertama dijaga oleh 3 (tiga) orang Pamfik sedangkan untuk shift ke-2 yaitu pada malam hari, pengamanan kantor dilakukan oleh 1 (satu) orang Pamfik dibantu dengan 1 (satu) orang honorar ruangan.

B. REKOMENDASI

1. Perlu penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 14 Orang dengan rincian 2 Orang Pengelola IT, 4 Orang Operator komputer IT, 2 orang akuntan (sebagai kasir perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 6 Orang staff administrasi.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
3. Agar para penanggung jawab unit kerja, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai bidangnya dan berpedoman pada program kerja.
4. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja.
5. Penambahan sarana dan prasarana teknologi informasi.
6. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

LAMPIRAN



**SK PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN
2020**



PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR W11-U20/5/KPN.Cbi/OT.01.2/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien, dan efektif, telah tersusun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan disusun dalam bentuk narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A akan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 selambat-lambatnya bulan Januari 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk panitia untuk mengumpulkan data, menyusun narasi, data, dan grafik, serta menyelenggarakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A;**

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, menyeleksi, menyusun narasi yang diperlukan, mengoreksi laporan dari masing-masing bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
 2. Memastikan laporan akhir dari masing-masing bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A telah tersusun menjadi laporan pelaksanaan kegiatan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran;
 3. Memastikan finalisasi laporan pelaksanaan kegiatan tersebut hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Acara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A secara tepat pada waktunya;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada panitia untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Cibinong
Pada Tanggal 04 Januari 2021



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung;
4. Arsip.-

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
Nomor : W11-U20/5/KPN.Cbi/OT.01.2/I/2021
Tanggal : 04 JANUARI 2021

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**

Pelindung/Penasihat : 1. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Ketua : Zulkarnaen, S.H.
Wakil Ketua : Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.
Sekretaris : Budi Wantoro, S.H., M.H.
Bendahara : Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.

Seksi Penyusunan Narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

**Koordinator : 1. Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H. (Kepaniteraan)
2. Budi Wantoro, S.H., M.H. (Keseekretariatan)**

Anggota : 1. Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.
2. Yunita Sofriani, S.H., M.H.
3. Endang Purwaningsih, S.H., M.H.
4. Enny Hudikari, S.H., M.H.
5. Linda Cahyati, S.H.
6. Riyanto, S.H.

Seksi Acara

:

Koordinator : Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Rina Zain, S.H.
2. Christina Simanullang, S.H., M.H.
3. Ika Dhianawati, S.H., M.H.
4. Putu Mahendra, S.H., M.H.
5. Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.
6. Yunita Sofriani, S.H., M.H.
7. Aris Kustiawan, S.H., M.H.
8. Niken Irawati, S.H., M.H.
9. Zuherma, S.H.
10. Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.
11. Dwi Djauhartono, S.H., M.H.

Seksi Dokumentasi/Publikasi

Koordinator : Amran S. Herman, S.H., M.H.

Anggota : 1. Wungu Putro Bayu K., S.H., M.H.
2. Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom.
3. Aris Sunaryo

Seksi Konsumsi

Koordinator : Lucy Ermawati, S.H., M.H.

Anggota : 1. Erlinawati, S.H.
2. Liena, S.H., M.Hum.
3. Endang Purwaningsih, S.H., M.H.
4. Satriani Yulianti, S.H.
5. Irshanti Meisita Ilma, S.H., M.H.
6. Dra. Rr. Wahyuningtyas
7. Ida Lestari, S.H.
8. Eti Sugiarti
9. Suprapti
10. Eva Trisnawati, S.H.
11. Suci Handayani, A.Md.
12. Sonya Ovelya

Seksi Perlengkapan, Dekorasi, dan Undangan :

Koordinator : Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

- Anggota :
- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Linda Cahyati, S.H. | 6. Irene Isabella N., S.H. |
| 2. Candrasah, S.H. | 7. Abdul Choir |
| 3. Haris Kaimudin, A.Md., S.H. | 8. Balqis Nabillah |
| 4. Dimas Lingga Wicaksana, S.H. | 9. Agung Devyanto, A.Md. |
| 5. Gabriela Yastika P., S.Psi. | |

Seksi Keamanan :

Koordinator : Eduward, S.H., M.H.

- Anggota :
- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Teuku Umar, S.H., M.H. | 5. Tansidi, S.H. |
| 2. Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H. | 6. Rizal Abdjul |
| 3. Sukirno, S.IP., S.H. | 7. Satpam |
| 4. Iman Hanafi, S.H. | |

Tim Pendukung

1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) DIPA
2. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Non DIPA

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, 



FRANJUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19630808 199212 1 001



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

Jl. Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kab. Bogor 16915
Tlp : (021) 87905154 Fax : 87905154 - 87905808
Website : www.pn-cibinong.go.id email : info.pncibinong@gmail.com